ACFE
Association of Certified Fraud Examiners
Indonesia Chapter #111

E-PROSIDING

1st NATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING & AUDITING

"Preventing Fraud in Era 4.0: What Should Millennial Auditors do?"

Program Studi Akuntansi
Universitas Trilogi
Jakarta
4 Desember 2019

NCAA

Sponsored by:

PENJAMINAN & INFRASTRUKTUR Guarantee & Infrastructure
BANK BRI KC JAKARTA KALIBATA
asuransi jasindo

Supported by:

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Wardah

NC AA 2019 NATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING & AUDITING

SUSUNAN PANITIA

Steering Committee : Rektor Universitas Trilogi

Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Kabul Wahyu Utomo.

Ketua Program Studi Akuntansi

Sri Opti, S.E.AK., M.M., CA

Project Officer : **Dr. Nurul Aisyah R., S.E., M.S.Ak**

Assistant : **Fitriah Kesuma Jelita**

Secretary : **Novita, S.E.Ak., M.Ak., CSRS., CA**

1. Anara Indrany Nanda Ayu Anissa – Assistant
2. Mumpuni Alifiyah – Assistant

Treasurer : **Rizka Ramayanti, S.E., M.Si. Ak**

Mayang Puspita Sari - Assistant

Event - Call for Paper : **Lely Dahlia, S.E., M.Ak**

1. Anissa Mellaningrum – Assistant
2. Syanindita Kirana Larashira – Assitant
3. Ardifa Tri Septianto
4. Novita Damayanti
5. Siti Umahatur Rahmawati
6. Hani Chairani

Event - Seminar : **Muyassaroh, S.E.Ak., M.M., CA**

1. Zania Aprilia
2. Anindita R. Hapsari
3. Sitta Aulia
4. Firdatul Jannah
5. Putri Azizah Setiawan

Pararel Session **: Husnul Khotimah, S.E., M.S.,Ak**

1. Wanda Maulida
2. Titania Auliansyah
3. Tiara Faradita
4. Farhanah Febriani
5. M. Reza Rachman
6. Nindya Mega Violina
7. Meidina Aulia Savitri

Sponsorship **: Sabrina Putri**

1. Lidia Nurhayati
2. Marsha Syifa Zahira
3. Vina Aulia
4. Richa Anjasmara Dewi
5. Meily Asfianti
6. Krisis Ayu Margaret Tumanggor
7. Eristia Pahingaran

Design & Documentation **: Afriliani**

1. Novita Wulandari
2. Azharan Ramadhani
3. Felia Diba Savitri

Foods & Beverages **: Khoirina Farina, S.E., M.S.,Ak**

1. Riski Rahmadani
2. Vicky harahap
3. Komang Muda Sedana Y.
4. Diva Viona Almira
5. Fitria Hana Tiara Ningrum

General of Affair and Logistic : Ludwina Harahap, S.E., M.S.,Ak

1. Rizky Ramadhani
2. Ahmad Maulana
3. Sahal Rikaz A.
4. Jemmy Alvin Nurrahim
5. Fiqi Andreansyah
6. Muhammad Rizki
7. Indra Gunawan

REVIEWER DAN MODERATOR

- **REVIEWER**

Internal

1. Dr. Anies Lastiati, SE.Ak., MHRM., M.Educ.Stud., CA
2. Dr. Nurul Aisyah Rachmawati, SE., M.S.Ak.
3. Lely Dahlia, SE., M.Ak
4. Novita, SE.Ak., M.Ak., CSRS., CA

Eksternal

1. Meidiyah Indreswari, S.E., Ak., M.Sc., Ph.D
2. Dr. Tarjo, S.E., M.Si., CFE., CFrA., CPA

- **MODERATOR**

Internal

1. Dr. Anies Lastiati, SE.Ak., MHRM., M.Educ.Stud., CA
2. Dr. Nurul Aisyah Rachmawati, SE., M.S.Ak.

Eksternal

1. Tri Marhendra, MSi(Han), M.Ak, CFE., Cert.IA, A-CPA. CA, Ak
2. Dr. Dahlia Sari, SE, M.Si
3. Dr. Ira Geraldina
4. Putri Wulanditya, SE., M.Ak., CPSAK
5. Dr. Nuzulul Hidayati, SE, MM.Ak, CA

- **MODERATOR SEMINAR**

1. Imam Nurcahyo Fambudi, SE., Ak., M.Ak., MBA., CA

DAFTAR ABSTRAK

Starting Business Facilitation and Foreign Direct Investments Entry Through Mergers and Acquisitions (M&A)
Rynalto Mukiwihando 1

Indikasi Kejahatan Korporasi Dalam Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Mustfa Kamal, Muhammad Taufiq 2

The Effect of Detecting Financial Statement Fraud of Accounting Data by External Auditors in Understanding Red Flags Which Aims to Reduce Audit Costs
IGP Ratih Andaningsih, Imron Rosyidi 3

Financial Statement Fraud* Dalam Perspektif *Fraud Diamond
Nabila Silviani, Novita 4

Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kebonan Mandiri
Eunike Widya Putri, Stefani Chrystabel 5

Pendeteksian Manipulasi Laporan Keuangan Menggunakan Beneish M- Score pada Perusahaan BUMN Sub-Sektor Transportasi
Panji Putranto, Huda Aulia Rahman, Andriawan, Shinta Geovani Lauren 6

Pengaruh Prinsip *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada *Fintech* Paypro)
Wilis Dwi Jayanti , Lely Dahlia 7

Pengaruh *Economic Performance,* Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) (Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2014-2018)
Eko Sudarmanto, Dyah Utari 8

Risiko PBJ Dan Strategi Mitigasi Organisasi
Sut Mutiah Sangadji 9

Implementasi Prinsip *Good Governance* Bisnis Syariah pada Lembaga Wakaf
Ana Fatimatussoleha. Novita 10

Pengaruh GCG, Inflasi dan Modal Intelektual terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Food and Beverage*
Panji Putranto, Sumiyati, Supriyatno, Lita Rahayu 11

Pengaruh Pengalaman Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2018)
Maylani Putri Utami, Anies Lastiati 12

Pengaruh Keanggotaan Wanita dan Latar Belakang Pendidikan Akuntansi Dalam Dewan Direksi Terhadap Manajemen Laba
Febryani Vini, Anies Lastiati 13

Pengaruh *Corporate Governance* dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak
Herlanda Putra Utama, Anies Lastiati 14

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan *Consumer Goods Industry* yang Terdaftar di BEI Tahun 2018)
Aganeka Pratama, Anies Lastiati 15

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Risiko (Studi Empiris pada Consumer Good Industry yang Terdaftar Dalam BEI)
Amalia Restika, Anies Lastiati 16

Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaanperbankanyang Terdaftar di BEI (2017)
Adhi Pramana Widjaya Syahputra 17

Hubungan Kepemilikan Asing Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Dengan Satu Variabel *Dummy* (Perusahaan Perbankan Di Bei Tahun 2018)
Amelia Rizqia, Anies Lastiati 18

Effect of Independent Commissioners And Manajerial Ownership on Sustainability Report Disclosure
Ria Agustin Prastiwi, Anies Lastiati 19

The Effect of Corporate Governance: Effective Tax Rates on Property, Real Estate and Building Construction Companies
Ita Febrianti, Anies Lastiati 20

Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan
Islah Nasiha, Anies Lastiati 21

Enterprise Risk Management and Firm Value: The Role Of Board Monitoring
Muhammad Faisal 22

Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Persediaan Sayur Dan Buah (Studi Kasus Sayurbox)
Regita M Farhana, Ludwina Harahap 23

Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Sistem Akuntansi Penjualan Tunai (Studi Kasus pada PT. Graha Kriya Indonesia)
Siti Rohmani, Ludwina Harahap 24

Pengendalian Dalam Implementasi *System Application and Product* (SAP) pada PT PLN (persero) UP3 salatiga
Gisha Aurellia Mustika Jawi, Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari 25

Analisis Persepsi Kebermanfaatan dan Kemudahan Sistem Informasi Akuntansi BUM Desa bagi BUM Desa Kebonan Mandiri
Stefani Chrystabel, Eunike Widya Putri 26

Firm Maturity, Slack Resources, and Corporate Social Responsibility
Rita Sugiarti 27

Implikasi Mekanisme *Corporate Governance* dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*
Elsafira Mala Anggeline, Novita 28

Pengaruh Posisi Etika Terhadap Hubungan Antara Peer Pressure dan Senjangan Anggaran
Sandra Nur Fitri, Suyanto 29

Analisis Profitabilitas Pelanggan dengan Menggunakan Metode *Activity Based Costing* pada *Vast Consulting*
Dea Ivana, Lely Dahlia 30

Analisis Penerapan *Environmental Management Accounting* dengan *Material Flow Cost Accounting* untuk Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Perusahaan (Studi Kasus PT. IPT)
Gabrielle Adelina Katherine, Lely Dahlia 31

Penerapan *Kaizen Costing* Dengan Menggunakan *Activity Based Management* Untuk Mengurangi Biaya Produksi Pada Pabrik Susu X
Dinah Diyanahsari, Lely Dahlia 32

Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Umkm Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Majelis Ulama Indonesia (PINBAS MUI)
Henny Mulyati, Nurwati, Feri Gustami 33

Studi Perbandingan Minat Masyarakat Terhadap Bank Syariah dan Bank Konvensional
Dwi Meta Purnamsari, Muyassaroh 34

Perancangan *Balanced Scorecard* Sebagai Sistem Pengukuran Kinerja Perusahaan (Studi Kasus PT. Juragan Kapal)
Desmauli Simanungkalit, Ludwina Harahap 35

Kaizen Costing dan Kualitas Layanan Administrasi Akademik Studi Kasus: Biro Administrasi Akademik Universitas Trilogi 2019 (Study Kasus Biro Administrasi Akademik Universitas Trilogi)
Nurisa Anzani, Muhammad Zamzami, Aulia Nurazizah, Lely Dahlia 36

Kepatuhan Pajak Di Perusahaan Tambang: Peran Kontekstual *Good Corporate Governance*
Bella Marcelina Putri, Brigitta Tania Sherlyene Rawis 37

Skema Pembiayaan KPBU
Soemarsono DW 38

Peran Komisaris Independen dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak
Ridha Amaliyah, Nurul Aisyah Rachmawati 39

e-044/NCAA/PMK/AKT-TRILOGI/XII/2019

NCAA 2019

ACFE Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter #111

IKATAN AKUNTAN INDONESIA Institute of Indonesia Chartered Accountants

6 SKP IAI
6 CPE ACFE

SERTIFIKAT

diberikan kepada

Anies Lastiati

sebagai

PEMAKALAH

*Dalam Kegiatan **1st National Conference on Accounting & Auditing** dengan tema*

"Preventing Fraud in Era 4.0: What should Millennial Auditors do?"

Auditorium Universitas Trilogi, Jakarta, Indonesia
Rabu, 04 Desember 2019

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Trilogi

Dr. Kabul Wahyu Utomo

Presiden ACFE Indonesia Chapter

Dr. Gatot Trihargo, Ak., MAFIS, CA, QIA, CPMA, CFE

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Herlanda Putra Utama[1], Anies Lastiati[2]

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trilogi

Jl. TMP Kalibata, Jakarta Selatan

e-mail : elanherlanda@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trilogi

Jl. TMP Kalibata, Jakarta Selatan

e-mail : anieslastiati@trilog.ac.id

ABSTRAK

Penerimaan pajak sangat berperan penting dalam menjalankan pemerintahan karena memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan negara. Perusahaan seringkali melakukan tindakan-tindakan untuk menurunkan beban pajaknya. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah dengan penghindaran pajak. Penelitian ini menguji pengaruh corporate governance dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang akan diamati adalah perusahaan kontruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2016-2018. Perusahaan yang digunakan untuk sampel setelah dikurangi beberapa kriteria sebanyak 13 amatan. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Variabel penghindaran pajak diproksikan dengan ETR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Corporate Governance* dan koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Corporate Governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Penghindaran pajak, *Corporate Governance*, Manajemen pajak, Effective tax rate, *Agency Theory*, *Agency Problem*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Dari perspektif pemerintah, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Penerimaan tersebut digunakan untuk pembangunan insfrastruktur, biaya Pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara.

Sedangkan dari perspektif perusahaan, pajak merupakan sebuah beban yang dapat mengurangi laba. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan berusahan melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan sediki sehingga perusahaan dapat mengambil keuntungan yang maksimal.

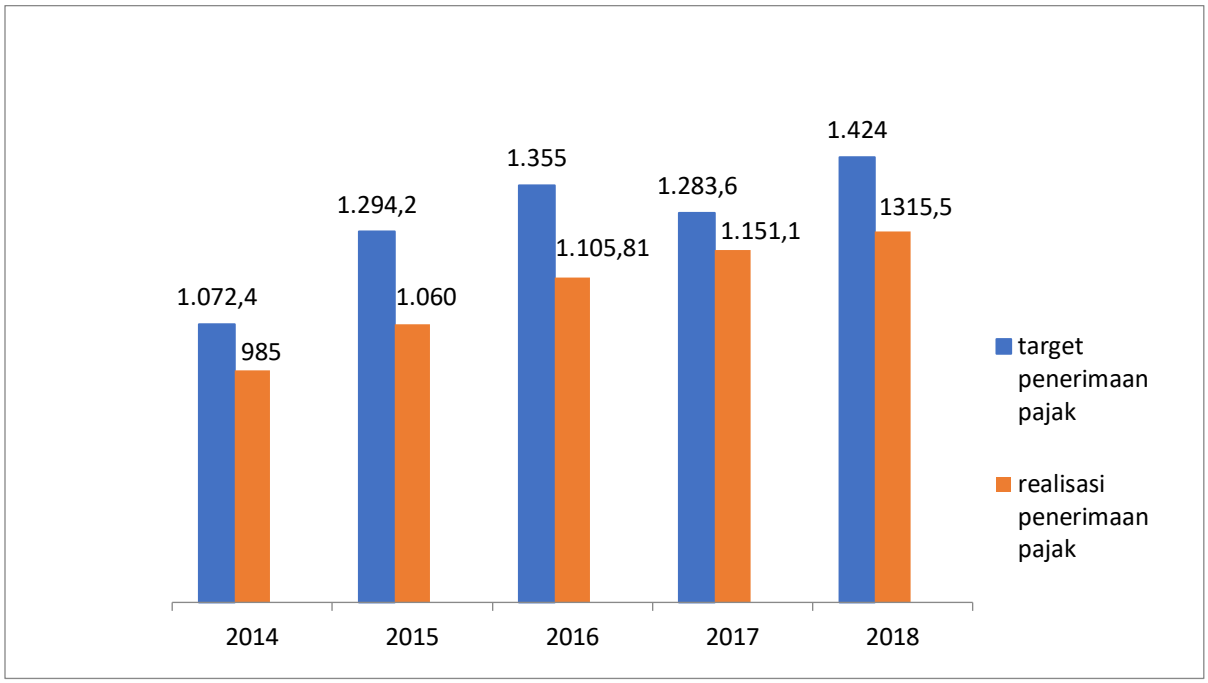

Berdasarkan hasil data tersebut menunjukan bahwa Realisasi penerimaan pajak dari tahun 2014 hingga tahun 2018 tidak adanya yang mencapai target penerimaan pajak. Pada tahun 2018 penerimaan pajak mencapai Rp 1.151,1 trilliun atau hanya 92,41% dari target APBN Rp 1.424 trilliun (center for Indonesia taxation analysis). Banyak berbagai faktor sehingga tidak tercapainya target realisasi penerimaan perpajakan. Salah satunya adanya tindakan pengelolaan beban pajak yang dilakukan oleh suatu entitas dalam rangka untuk memaksimalkan laba dengan cara melakukan Manajemen pajak. Manajemen pajak dapat dilakukan dengan cara Penghindaran pajak (tax avoidance) yaitu dimana suatu entitas melakukan pengurangan pajak secara legal dengan cara memanfaatkan celah celah atau kelemahan dari undang undang perpajakan yang berlaku. Tindakan penghindaran pajak (Tax avoidance) tegolong unik dan serta rumit, dikarenakan tindakan ini tidak ada aturan atau hukum yang mengatur tentang penghindaran pajak (Tax avoidance) dan bahkan tidak dilarang namun tindakan ini tidak diinginkan oleh pemerintah (Budiman dan Setiyono, 2012) . Sehingga dengan tindakan penghindaran pajak merupakan salah satu faktor dalam turunnya penerimaan negara dan memerlukan perhatian khusus.

Selain itu ada juga dengan melakukan penggelapan pajak (Tax evasion). Berbeda halnya dengan pengurangan pajak. Penggelapan pajak merupakan tindakan yang illegal yang dilakukan oleh suatu entitas bisnis tetapi dengan cara yang kotor dengan kata lain melanggar undang undang perpajakan yang berlaku. Tindakan penghindaran pajak (Tax avoidance) terbilang unik Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki system dan undang

undang peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satunya seperti membuat program sensus pajak nasional yang dimana melakukan kegiatan pendataan wajib pajak dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi para subjek pajak baik orang pribadi maupun badan usaha diseluruh Indonesia yang dilakukan oleh direktorat jendral pajak.

Koneksi politik sering terjadi pada negara negara berkembang dengan perlindungan hak kepemilikan monoritas yang lemah salah satunya Indonesia (Fisman, 2001). Pada satu sisi, koneksi politik sering dimanfaatkan untuk mengambil manfaat atas pajak yang dengan menggunakan kedekatan dengan pemerintah untuk memperoleh perlakuan istimewa dari pemerintah dalam hal perpajakan (Zhang. et. al, 2012). Koneksi politik juga dapat dimanfaatkan untuk memungkinkan mengurangi pemeriksaan pajak (Li. et. al, 2012). namun pada sisi lain koneksi politik juga bisa menjadi hal positif bagi penerimaan pajak (Zhang. et. al, 2012). perusahaan BUMN membayar pajak yang besar dapat menguatkan citra para direksi maupun komisaris. Dengan citra tersebut para direksi maupun komisaris bisa jadi bahan pertimbangan untuk tetap dipertahankan menjadi direksi maupun komisaris.

Di negara Indonesia, koneksi politik sudah menjadi hal yang umum dilakukan dengan memberikan jatah jabatan kepada orang yang dekat dengan pemerintah. Peristiwa ini sering terjadi pada perusahaan BUMN. Pengisian jabatan dewan direksi ini sudah muncul pada era kepresidenan Susilo Bambang yudhoyono dan terjadi sampai saat ini pada era kepresidenan jokowi Widodo (Bayu Agung Pranoto dan Ari Kuncoro Widagdo, 2014). Hal ini menunjukan bahwa pengisian direksi maupun komisaris merupakan hal yang umum terjadi dalam struktur organisasi perusahaan BUMN di indonesia. Tetapi dengan kata lain pengsisian jabatan direksi maupun komisaris pemerintah juga memperhatikan keahlian dan kompetensi dari para calon direksi maupun komisaris. Dengan hal ini pemerintah berharap dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh para direksi maupun komisaris dapat memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan.

Aktivitas tindakan penghindaran pajak bisa dicegah dengan adanya tata kelola yang baik bagi suatu entitas baik dari entitas BUMN ataupun swasta. Penerapan tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam kewajiban pembayaran pajak(Santoso dan Muid, 2014). Jika suatu perusahaan menerapkan tata kelola yang baik maka kemungkinan patuh terhadap kewajiban pajak semakin tinggi (Sartori, 2010). Penerapan atas prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dibutuhkan dalam rangka mendukung pertumbuhan perusahaan yang sehat khususnya. *Corporate Governance* di Indonesia muncul akibat adanya krisis ekonomi pada tahun 1998 yang mengakibatkan gejolak ekonomi dan banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Maka dari itu *Corporate Governance* menjadi perhatian khusus baik bagi pemerintah maupun para shareholder.

Corporate Governance tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. *Good Governance* telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional. Dengan cara meningkatkan akuntabilitas, reliabilitas atau handal dan pengambilan kebijakan-kebijakan, yang diperkirakan di dalam organisasi pemerintah maupun entitas swasta. Perusahaan dengan pengelolaan yang baik akan selalu memprioritaskan kebijakan perusahaan demi keberlangsungan perusahaan (*Going Concern*).

Teori Agensi (*Agency Theory*) merupakan dasar teori yang digunakan untuk memahami *Corporate Governance*. Teori ini berisi dimana satu atau lebih (*Principal*) menunjuk seorang

lainnya (agen atau manajer) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama pemilik (Jensen dan Meckling, 1976). Pemegang saham sebagai principal mengeluarkan biaya agensi untuk sebagai pengawasan pada setiap tindakan manajemen yang diambil (*Agent*). Kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda dan agen memiliki informasi lebih banyak, maka pemilik (*Principal*) tidak bisa secara langsung memastikan bahwa agennya selalu bertindak dalam kepentingan yang terbaik bagi pemilik.Permasalah ini sering terjadi dan disebut sebagai masalah agensi (*Agency Problem*). Masalah keagenan terjadi apabila bagian kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari seratus persen (Masdupi, 2005).

Dengan proporsi kepemilikan yang hanya sebagian dari perusahaan membuat manajer cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk memaksimumkan perusahaan. Inilah yang nantinya akan menyebabkan biaya keagenan (*Agency Cost*). Biaya keagenan ini bisa saja kecil atau besar tergantung pada perusahaan apakah telah menerapkan *Corporate Governance* secara baik atau bahkan sebaliknya. Jika suatu perusahaan memiliki *Corporate Governance* yang lemah maka biaya agensi yang dikeluarkan juga akan besar. Biaya ini dapat dikurangi dengan meningkatkan pengawasan oleh pemegang saham institusional sehingga nantinya dapat memberikan pengawasan yang lebih baik kepada manajemen. Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki *Zero-Agency Cost* dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal pandangan shareholders karena adanya kepentingan yang besar di antara mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa *Corporate Governance* dan Koneksi Politik mempengaruhi Tax avoidance di perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2016-2018. Penelitian yang mendasari ini adalah penilitian (Laila Marfu'ah, 2015) yang menggunakan 5 variabel independent yaitu return on asset (*ROA*), leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik mempengaruhi tax avoidance. Sedangkan dalam penelitian ini hanya membahas dua variable yaitu *Corporate Governance* dan Koneksi Politik sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya informasi dari penelitian terdahulu.

Dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengambil judul " PENGARUH KONEKSI POLITIK, CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Perusahaan Kontruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018)

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Tax Avoidance

Tax Avoidance adalah pengaturan untuk meminimumkan atau bahkan menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. Tax Avoidance bukan pelanggaran undang – undang perpajakan melainkan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan dan meringankan beban pajak dilakukan dengan cara mencari kelemahan dari Undang – Undang perpajakan.(Kurniasih & Sari, 2013). Upaya tersebut disebut dilakukan dengan perencanaan pajak (tax planning). Menurut (Suandy, 2008) memaparkan beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, antara lain :

- Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran

- Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran

- Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran dan

- Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

2. Koneksi Politik

Menurut Gomez dan Jomo (2009), perusahaan yang mempunyai koneksi politik merupakan perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Perusahaan yang mempunyai hubungan dekat berati dimana ada anggota dewan atau salah satu pimpinan di perusahaan mempunyai hubungan yang sangat dengan kepemerintahan, koneksi politik merupakan tingkat kedekatan hubungan perusahaan dengan pemerintah. Perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara–cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Koneksi politik dipercaya sebagai suatu sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan .Faccio (2006) menjelaskan bahwa perusahaan dianggap memiliki koneksi secara politik jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 25% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atas atau partai politik. Koneksi politik juga dapat dilihat dari ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan.

3. *Corporate Governance*

Thomas (2006) menyebutkan bahwa good corporate governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholder. Konsep ini menekankan pada dua hal, Pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya, Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penerapan *Corporate Governance* pada perusahaan dapat mempengaruhi keputusan strategis perusahaan. Penerapan *corporate governance* yang terstruktur dengan baik akan membuat agent untuk mematuhi segala peraturan yang ada termasuk tidak melakukan tindakan yang agresif terhadap tindakan tax planning. Tindakan ini bertujuan agar kinerja agent dapat mengalami peningkatan. Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang berisiko sehingga diperlukan kontrol yang baik agar tidak membawa kerugian bagi perusahaan. Buruknya control dari principal dapat membuat agent melakukan tindakan yang berisiko. Sari (2010) menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif pada penerapan *Corporate Governance* terhadap agresifitas pajak perusahaan. Semakin baik penerapan *Corporate Governance* maka ketaatan perusahaan akan semakin meningkat yang digambarkan dengan nilai *Effective tax rate* yang tinggi

H1 : *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap *Effective tax rate*

Koneksi politik yang dijalin oleh perusahaan akan membuat perusahaan memperoleh berbagai keuntungan. Keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan yang memiliki koneksi politik yaitu mendapatkan pinjaman secara mudah. Pemeriksaan pajak yang rendah juga merupakan salah satu keuntungan perusahaan memiliki koneksi politik sehingga perusahaan tidak takut untuk melakukan perencaan pajak sehingga laporan keuangan perusahaan tidak transparansi. (Butje dan Tjondro, 2014) juga menemukan pengaruh positif antara koneksi politik dan penghindaran pajak perusahaan yang digambarkan dengan rendahnya nilai Effective tax rate

H2: Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penilitan ini adalah dengan metode kualitatif yang diambil dari data BEI (Bursa Efek Indonesia) dengan 13 perusahaan industry kontruksi bangunan (2016-2018) Variable dependen pada penelitian ini yaitu *Corporate Governance* dan Koneksi Politik sedangkan variable independentnya adalah *Effective Tax rate* (ETR). Penghindaran pajak merupakan usaha wajib pajak untuk mencari tahu cara yang berbeda untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak tanpa melanggar hokum. Penghindaran pajak dihitung dengan *Effective tax rate* :

$$\text{ETR} : \frac{Tax\ Expense}{Pretax\ Income}$$

Pengukuran pada *Corporate Governance* menggunakan metode *self-assesment* berdasarkan kriteria kriteria dari *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* dengan kriteria sebagai berikut :

1. Hak pemegang saham (bobot 20%).

Dalam hak-hak pemegang saham, antara lain kita dapat memberikan evaluasi, apakah perusahaan telah:

- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam kurun waktu 6 bulan setelah akhir tahun buku, sesuai dengan pasal 65 ayat 2 UU Perusahaan Terbatas;
- menyerahkan kepada pemegang saham pemberitahuan mengenai Rapat Tahunan Pemegang Saham sekurang-kurangnya 28 hari sebelum RUPS diselenggarakan;
- mendorong para pemegang saham untuk menghadiri RUPS dan memanfaatkan hak suara mereka;
- memberikan kesempatan yang cukup kepada para pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan di RUPS; dll.

2. Kebijakan GCG (bobot 15%).

Dalam kebijakan GCG antara lain kita dapat menilai sendiri apakah perusahaan telah:

- memiliki aturan tertulis tentang GCG di mana dijelaskan hak-hak pemegang saham, tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi dan Dewan Komisaris;

- menyediakan akses bagi publik untuk mengetahui kebijakan perusahaan mengenai investor publik;
- membentuk sebuah organ yang bertanggung jawab (misalnya Dewan Komisaris) untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan GCG yang telah ditetapkan;
- memiliki aturan perilaku / etika bagi karyawan secara tertulis;
- menginformasikan dan melaksanakan dengan baik aturan perilaku / etika tersebut; dll.

3. Praktik GCG (bobot 30%).

Dalam praktik GCG ini antara lain kita dapat menguji apakah di dalam perusahaan:

- Dewan Direksi mengadakan rapat berkala secara teratur dengan Dewan Komisaris;
- ada rencana strategis dan rencana operasional yang memberi petunjuk kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka;
- Dewan Direksi dan Dewan Komisaris telah diberikan pelatihan atau mempunyai latar belakang yang tepat, yang memungkinkan mereka untuk melakukan tugas-tugas mereka;
- anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tidak terlibat konflik kepentingan;
- ada sistem penilaian kinerja Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris; dll.

4. Pengungkapan (bobot 20%).

Dalam seksi ini kita dapat menilai apakah perusahaan telah:

- menyediakan akses yang sama bagi pemegang saham dan analis keuangan;
- memberikan penjelasan yang tepat tentang risiko usaha;
- mengungkapkan remunerasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dengan benar;
- mengungkap transaksi pihak terkait;
- menyajikan hasil kinerja keuangan dan manajemen analisis melalui internet; dll.

5. Audit (bobot 15%) .

Pada bagian ini kita dapat menilai apakah perusahaan telah:

- memiliki audit internal yang efektif,
- diaudit oleh akuntan publik yang independen,
- memiliki komite audit yang efektif,
- mengembangkan komunikasi yang efektif antara audit internal, audit eksternal dan komite audit, dll.

Skor akhir diperoleh dari penjumlahan nilai dari setiap tahapan yang telah dilakukan. Tingkatan skor dibagi kedalam 3 kelompok yaitu sangat terpercaya, terpercaya, dan cukup terpercaya. Skor yang masuk kriteria sangat terpercaya yaitu 85-100, untuk kriteria terpercaya yaitu 70-84,99 dan terakhir kriteria cukup terpercaya dengan skor sebesar 55-69,99. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dari web BEI. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.
Hasil Analisis statistic deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CG	39	78.93	90.75	84.0926	3.21247
Koneksi_Politik	39	.00	1.00	.3077	.46757
ETR	39	.006122	.485625	.11665930	.134064939
Valid N (listwise)	39				

Analisis statistik deskriptif memberikan hasil yaitu nilai rata-rata ETR sebesar 0.11665930. nilai maksimum yaitu 0.485625 diperoleh oleh PT Adhi Karya pada tahun 2016. Nilai minimun sebesar 0.006122 diperoleh oleh PT Nusa Raya Cipta pada tahun 2016. Variable corporate governance menunjukkan nilai rata-rata sebesar 84.0926. nilai maksimum diperoleh oleh PT Cahaya Sakti Investindo Sukses berturut turut pada tahun 2018 dan 2017. Nilai terendah diperoleh oleh PT Adhi Karya pada tahun 2016. Nilai rata rata koneksi politik sebesar 0.3077.
Variabel dikatakan lolos multikolinieritas jika tolerance > 0,01 dan VIF < 10. Seluruh variabel memenuhi kriteria tersebut maka model lolos dari multikolinieritas.

Tabel 2.

Hasil uji asumsi klasik

Parameter yang diuji	Uji Normalitas	Uji Multikolinearitas		Uji Heteroskedastisitas	Uji autokorelasi
	Asymp.Sig. (2-tailed)	Tolerance	VIF	sig.	DW
1 (Constant)				.237	
Koneksi_Politik	.000	.930	1.075	.108	1.382
CG		.930	1.075	.302	

a. Dependent Variable: ETR

Kriteria untuk lolos heteroskedastisitas jika variabel harus memiliki sig. > 0,05. Dilihat dari tabel 2 maka pada seluruh variabel tidak ada gejala heteroskeastisitas. Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat nilai Durbin-Watson sebesar 1,382 yang berada di antara -2 dan 2 maka ini berarti tidak terjadi gejala autokorelasi.

Tabel 3

Hasil Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.577	.584		.988	.330
	CG	-.006	.007	-.137	-.843	.405
	Koneksi_Politik	.083	.047	.284	1.749	.089
	R Square	.120				
	F Hitung	2.447				
	Sig. F					.101

Tabel 3. Menunjukkan hasil regresi linier berganda yang diperoleh pada penelitian ini. Berdasarkan hasil tersebut persamaan regresi disusun sebagai berikut.

$Y = 0{,}577 - 0{,}006X1 + 0{,}083X2 + \varepsilon$

Keterangan:

Y = ETR

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

ε = Standar error

X1 = Corporate governance

X2 = Koneksi politik

Hasil pengujian hipotesis memperoleh hasil bahwa hipotesis pertama diterima yang berarti *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap ETR. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik perusahaan menerapkan *Corporate Governance* maka ETR akan naik sehingga dapat disimpulkan penghindaran pajak rendah. Tata kelola perusahaan yang baik dapat terhindar dari adanya prilaku yang buruk dari para agent. Dan memaksa para agent untuk dapat tunduk dan patuh terhadap peraturan yang ada. *Corporate Governance* memegang peranan penting dalam melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan yang akan diambil oleh manajemen. Apabila sistem pengawasan telah terstruktur dengan baik, maka manajemen akan bekerja sesuai dengan tujuan yang diinginkan tanpa adanya sikap mementingkan kepentingan pribadi para agent. Hal ini akan menurunkan kemungkinan munculnya masalah keagenan yang merugikan dan dapat menjaga *Going Concern* perusahaan.

Pada pengujian hipotesis kedua bahwa nilai sig. variable koneksi politik > a = 0.05. artinya bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap ETR. Kadang kala perusahaan dengan adanya

koneksi politik tidak selalu dimanfaatkan koneksi tersebut dengan memanfaatkan keuntungan pribadi. Dengan tidak adanya pengaruh terhadap ETR perusahaan lebih mengedepankan citra ataupun reputasinya tersebut untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuannya. Perusahaan yang patuh seringkali mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai wajib pajak penuh. Hal ini juga akan mendorong perusahaan akan terus selalu mengikuti berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan adanya kedekatan dengan politik memang banyak memberikan beberapa keuntungan. Keuntungan tersebut bisa dipergunakan secara baik ataupun buruk. Namun juga perusahaan harus lebih memikirkan jangka Panjang terkait keputusan yang akan diambil dalam mengambil manfaat tersebut. Buruknya citra perusahaan akan berdampak Panjang sehingga akan hilangnya kepercayaan masyarakat dan akan menyebabkan kerugian. Masyarakat manruh perhatian seris terhadap citra perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi maupun menggunakan produk yang dikeluarkan perusahaan.

DISKUSI

Penelitian ini menunjukkan bahwa memang ada hubungan antara *Corporate Governance* dan Koneksi politik terhadap aktivitas penghindaran pajak. Semakin baik menerapkan *Corporate Governance* maka akan menurunkan aktivitas tindakan penghidaran pajak. Tetapi hasil negatif diraih dengan hubungan antara koneksi politik dengan aktivitas penghindaran pajak. Penerapan *Corporate Governance* memang menjadi salah satu “obat” dalam pembenahan perusahaan untuk menjadi perusahaan yang lebih baik. Memang, untuk menentukan apakah suatu perusahaan telah menerapkan *corporate governance* ini belum ada alat yang valid untuk menilai perusahaan apakah telah menjalankan *Corporate Governance* dengan baik. Penilaian *Corporate Governance* pada penelitian ini menggunakan *self-assessment*. Dimana peneliti menilai suatu entitas dengan kriteria-kriteria berdasarkan *Forum Corporate Governance Indonesia* (FCGI). Dengan adanya koneksi politik bukan berati bahwa perusahaan tersebut mendapatkan keringanan dalam membayar perpajakan. Dengan adanya koneksi politik justru perusahaan menjadi tolak ukur bagi perusahaan perusahaan lain dalam pembayaran perpajakan. Karena dengan adanya pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan, perusahaan akan mendapatkan reward dan menaikkan reputasi perusahaan. Masyarakat menaruh perhatian serius terhadap citra perusahaan sebelum memutuskan berinvestasi maupun menggunakan produk yang dikeluarkan perusahaan. Jadi dengan adanya koneksi politik justru perusahaan mendapatkan tanggung jawab lebih dari pemerintah dan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan atau keputusan apapun agar tetap mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai wajib pajak yang patuh.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa : (1) *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap ETR. Semakin baik perusahaan menerapkan *Corporate Governance* akan menurunkan tingkat penghindaran pajak yang ditunjukkan dengan ETR yang tinggi. (2) koneksi politik tidak berpengaruh terhadap ETR. Artinya bahwa perusahaan yang dimiliki sahamnya oleh pemerintah akan senantiasa terus patuh dan tunduk terhadap pembayaran pajak yang akan menaikkan citra ataupun reputasi bagi perusahaan tersebut.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dan simpulan, saran dari peneliti kepada pihak yang memiliki kepentingan adalah (1) perusahaan harus lebih memperhitungkan resiko akan dampak jangka Panjang yang terjadi terkait dengan setiap keputusan yang diambil. Perusahaan juga harus menerapkan tata kelola secara optimal agar tindakan yang dapat merugikan dapat diminimalisir. Peran CG sangat penting bagi perusahaan sebagai alat monitoring perusahaan. (2)

fiskus agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. (3) pada penilitian ini hasil R^2 yang diperoleh tergolong rendah yaitu .120 (12 %) sisanya 88 % karena pengaruh variable lain. Peneliti selanjutnya diharapkan memakai variabel yang lebih relevan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak .

Referensi

A. Desai, M. (2004). *CORPORATE TAX AVOIDANCE AND HIGH POWERED INCENTIVES*, 1-34.

A. Desai, M. (2005). *CORPORATE TAX AVOIDANCE AND FIRM VALUE*, 1-24.

A. Desai, M. (2008). *Tax and Corporate Governance: An Economic Approach*.

Anggoro, S. T., & Septiyani, A. (2015). *ANALISIS PENGARUH PERILAKU PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN TRANSPARANSI SEBAGAI VARIABEL MODERATING* , 1-10.

Annuar, H. A., Salihu, I. A., & Obid, S. S. (2014). *Corporate ownership, governance and tax avoidance: An interactive effects*.

Chen, Z., D. Dyreng, S., & Li, B. (2018). *Corporate Political Contributions and Tax Avoidance*, 1-47.

Faccio, M. (2003). *Politically Connected Firms*.

Faradiza, S. A. (2019). *Dampak Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak*, 1-116.

Hardianti, E. P. (2013). *ANALISIS TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN*, 1-25.

J. Crocker, K. (2004). *CORPORATE TAX EVASION WITH AGENCY COSTS*, 1-27.

Kaihatu, T. S. (2006). *GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA*.

Kim, S., Kim, H., Her, M., & Kim, H. (2006). *Does Political Intention Affect Tax Evasion ?*, 1-23.

Kurniasih, T., & Sari, M. M. (2013). *PENGARUH RETURN ON ASSETS, LEVERAGE, CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL PADA TAX AVOIDANCE*.

Marfu'ah, L. (2015). *PENGARUH RETURN ON ASSET, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP TAX AVOIDANCE*.

Pranoto, B. A., & Widagdo, A. K. (2014). *PENGARUH KONEKSI POLITIK DANCORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AGGRESSIVENESS*, 472-485.

Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). *PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK*, 1-13.

S. Amstrong, C., L. Blouin, J., D. Jagolinzer, A., & F. Lacker, D. (2015). *Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance*, 1-42.

Santoso, T. B. (2014). *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN*, 1-37.

Sari, I. (2010). *PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERBANKAN NASIONAL*.

Zhang, H., Jian, M., & Li, W. (2012). *How does state ownership affect tax avoidance? Evidence from China*, 1-39.

Zhang, L. (2014). *Corporate political connections and tax aggressiveness*, 1-54.